



PERUBAHAN RENJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Daftar Isi

	Hal.
Daftar Isi.....	I
Daftar Tabel.....	li
Kata Pengantar.....	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Sampai Dengan triwulan II	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	12
3.3 Program dan Kegiatan.....	15
BAB IV PENUTUP.....	35

Daftar Tabel

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hal 6-10
Sampai Dengan Semester I.....

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Perangkat Daerah Hal14-14

Tabel 3.2

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja hal 16-34
OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Perubahan Renja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Gunungtua, 28 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Drs. AR.MARJONI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19720608 199302 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu dokumen perencanaan SKPD, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan dokumen perencanaan untuk semester II tahun berjalan, secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2025 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini, agar pelayanan dapat maksimal/berjalan lancar.

Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2025 adalah:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
3. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.9 Tahun 2022 tentang Uraian tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja RPD tahun 2025. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2019, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 ini adalah : Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.
- b. Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD sampai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Sampai Dengan Triwulan II

Untuk mencapai target-target indikator kinerja pada Perangkat Daerah maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025 ini. Adapun jumlah Program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 2 (dua) Program sudah termasuk Program Rutin, sementara jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 16 (enam belas) Kegiatan, dan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan sudah termasuk Sub Kegiatan Rutin, dengan alokasi dana belanja untuk Tahun 2025 sebesar Rp35.539.482.985,00,-.

Adapun yang jumlah realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ini sebesar Rp. 16.897.356.427,- Atau sebesar 47,55% dari total pagu anggaran yakni Rp. 35.539.482.985,- dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 45%.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sampai Semester I Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Nama OPD : Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renstra OPD tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan yang Prima		Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,27	%											
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	%											
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi	90	%	25.028.202.985	90 %	25.028.202.985	90 %	9.277.904.284				100%	37%	
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	13.603.000	100 %	13.603.000	100 %	13.526.000				100%	99%	
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang terselesaikan	2	dok	4.540.000	2 dok	4.540.000	2 dok	4.524.600				100%	100%	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang terselesaikan	1	dok	4.540.000	1 dok	4.540.000	1 dok	4.524.600				100%	100%	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang terselesaikan	1	dok	4523000,00	1 dok	4523000,00	1 dok	4.476.800				100%	99%	
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP yang terselesaikan	1	dok	Rp0,00	1 dok	Rp0,00	0 dok	Rp0,00				0%		
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	19.244.616.035	100 %	19.244.616.035	100 %	7.441.271.871				100%	39%	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan gaji dan tunjangan ASN	14	lap	19.227.330.035	14 lap	19.227.330.035	7 lap	7.441.271.871				50%	39%	
1.2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1	lap	5.910.000	1 lap	5.910.000	- lap	Rp0,00				0%	0%	

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2025

1.2.3		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 lap	5.688.000	1 lap	5.688.000	- lap	-					0%	0%	
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran OPD	18 lap	5.688.000	18 lap	5.688.000	- lap	Rp0,00					0%	0%	
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000					100%	100%	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang teradakan	60 stell	Rp0,00	60 stell	Rp0,00	- stell	Rp0,00					0%		
1.3.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah keikutsertaan Pegawai sekretariat DPRD dalam seminar ,loka karya dan studi banding	25 pns	220.000.000	25 pns	220.000.000	25 pns	220.000.000					100%	100%	
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	100 %	1.444.172.500	100 %	1.444.172.500	100 %	354.771.550					100%	25%	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 pkt	79.934.000	4 pkt	79.934.000	1 pkt	24.996.950					25%	31%	
1.4.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 pkt	212.739.000	12 pkt	212.739.000	6 pkt	97.860.400					50%	46%	
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 pkt	966.964.200	20 pkt	966.964.200	3 pkt	146.793.000					15%	15%	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah yang dicetak dan digandakan	12 pkt	124.275.300	12 pkt	124.275.300	6 pkt	69.991.200					50%	56%	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	30 pkt	60.260.000	30 pkt	60.260.000	8 pkt	15.130.000					27%	25%	
1.4.6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	Rp0,00	2 dok	Rp0,00	- dok	Rp0,00					0%		
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	350.791.200	90 %	350.791.200	90 %	-					100%	0%	
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	3 unit	Rp0,00	3 unit	Rp0,00	- unit	Rp0,00					0%		
1.5.2		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubel	30 bh	Rp0,00	30 bh	Rp0,00	- bh	Rp0,00					0%		

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2025

1.5.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	350.791.200	3 unit	350.791.200	- unit	Rp0,00					0%	0%	
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	2.918.244.250	90 %	2.918.244.250	40 %	1.156.820.463					44%	40%	
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4.000 bh	30.000.000	4.000 bh	30.000.000	2.000 bh	30.000.000					50%	100%	
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah materai yang disediakan	12 lap	281.780.000	12 lap	281.780.000	6 lap	145.363.813					50%	52%	
1.6.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah tagihan telepon, hndwit internet dan kwh listrik	12 lap	235.647.000	12 lap	235.647.000	6 lap	98.766.650					50%	42%	
1.6.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 lap	2.370.817.250	12 lap	2.370.817.250	6 lap	882.690.000					50%	37%	
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpelihara dan terawatnya Barang Milik Daerah	90 %	104.450.000	90 %	104.450.000	90 %	8.807.000					100%	8%	
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang mendapatkan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan	5 unit	47.200.000	5 unit	47.200.000	1 unit	8.807.000					20%	19%	
1.7.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya yang mendapatkan jasa pemeliharaan /rehabilitasi	6 unit	57.250.000	6 unit	57.250.000	- unit	Rp0,00					0%	0%	
1.8		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	30 dwn	375.000.000	30 dewan	375.000.000	30 dewan	-					100%	0%	
1.8.1		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian dinas DPRD beserta kelengkapannya	30 Pkt	210.000.000	30 pkt	210.000.000	0 pkt	Rp0,00					0%	0%	
1.8.2		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah anggota DPRD yang melakukan medical cek up DPRD	30 org	165.000.000	30 org	165.000.000	- org	Rp0,00					0%	0%	
1.9		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah layanan administrasi DPRD	30 dwn	357.326.000	30 dewan	357.326.000	30 dewan	82.707.400					100%	23%	
1.9.1		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fasilitasi Fraksi DPRD	20 lap	102.960.000	20 lap	102.960.000	4 lap	18.978.000					20%	18%	
1.9.2		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi makan minum rapat konsultasi dan kordinasi DPRD	12 lap	254.366.000	12 lap	254.366.000	3 lap	63.729.400					25%	25%	

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2025

	Terwujudnya Harmonisasi hubungan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu		90	%											
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda		90	%											
2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				10.511.280.000		10.511.280.000		7.619.452.143					72%	
2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang terlaksana	90	%	437.748.500	90	%	437.748.500	90	%	17.217.000			100%	4%
2.1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah propemperda yang dibahas dan tersusun	20	dok	Rp0,00	20	dok	Rp0,00	-	dok	Rp0,00			0%	
2.1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah ranperda yang dibahas	20	dok	26.948.500	20	dok	26.948.500	-	dok	Rp0,00			0%	0%
2.1.3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	jumlah Pengkajian perundang undangan	2,00	dok	21.920.000	2,00	dok	21.920.000	-	dok	Rp0,00			0%	0%
2.1.4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Ranperda Usul Inisiatif DPRD yang tersusun	5	dok	366.960.000	5	dok	366.960.000	1	dok	8.672.000			20%	2%
2.1.5		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun	1	dok	21.920.000	1	dok	21.920.000	1	dok	8.545.000			100%	39%
2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi	90	%	202.663.400	90	%	202.663.400	90	%	-			100%	0%
2.2.1		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA-PPAS	1	dok	40.660.000	1	dok	40.660.000	-	dok	Rp0,00			0%	0%
2.2.2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA-PPAS	1	dok	40.660.000	1	dok	40.660.000	-	dok	Rp0,00			0%	0%
2.2.3		Pembahasan APBD	Jumlah dokumen pembahasan APBD	1	dok	40.660.000	1	dok	40.660.000	-	dok	Rp0,00			0%	0%
2.2.4		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen pembahasan APBD Perubahan	1	dok	40.660.000	1	dok	40.660.000	-	dok	Rp0,00			0%	0%
2.2.5		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pertanggungjawaban APBD	1	dok	40.023.400	1	dok	40.023.400	-	dok	Rp0,00			0%	0%
2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kepuasan layanan fasilitasi kegiatan-kegiatan monitoring DPRD	90	%	95.400.000	90	%	95.400.000	90	%	1.200.000			100%	1%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2025

2.3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah laporan Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	1 lap	95.400.000	1 lap	95.400.000	- lap	1.200.000					0%	1%	
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD			70 %												
2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentasi peningkatan kapasitas DPRD	90 %	1.185.513.000	90 %	1.185.513.000	90 %	873.200.212					100%	74%	
2.4.1		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan Anggota DPRD dalam seminar ,loka karya dan studi banding	30 Org	984.420.000	30 org	984.420.000	30 Org	682.027.212					100%	69%	
2.4.2		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah informasi tentang fungsi DPRD terhadap layanan public yang terpublikasikan	1 dok	Rp0,00	1 dok	Rp0,00	- dok	Rp0,00					0%		
2.4.3		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rapat penyusunan program kerja DPRD	1 dok	142.608.000	1 dok	142.608.000	1 dok	140.688.000					100%	99%	
2.4.4		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah profil DPRD kabupaten Padang Lawas Utara	1 dok	58.485.000	1 dok	58.485.000	1 dok	50.485.000					100%	86%	
2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	persentase terserap dan terhimpunnya aspirasi masyarakat	90 %	2.762.970.100	90 %	2.762.970.100	30 %	1.035.618.100					33%	37%	
2.5.1		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	1 dok	138.642.100	1 dok	138.642.100	1 dok	138.642.100					100%	100%	
2.5.2		Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	3 dok	2.624.328.000	3 dok	2.624.328.000	1 dok	896.976.000					33%	34%	
2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	90 %	Rp0,00	90 %	Rp0,00	- %	Rp0,00					0%		
2.6.1		Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah laporan kasus yang diselesaikan	1 lap	Rp0,00	1 lap	Rp0,00	- lap	Rp0,00					0%		
2.7		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi tugas DPRD	100 %	5.826.985.000	100 %	5.826.985.000	100 %	5.692.216.831					100%	98%	
2.7.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Koordinasi dan konsultasi	1 dok	5.788.625.000	1 dok	5.788.625.000	1 dok	5.676.265.831					100%	98%	
2.7.2		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dok	38.360.000	1 dok	38.360.000	1 dok	15.951.000					100%	42%	
					35.539.482.985		35.539.482.985		16.897.356.427						48%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas, dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah Kebijakan Nasional dalam perubahan APBN 2025 berfokus pada penguatan kualitas belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan kesinambungan pembangunan nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk penguatan belanja modal, reformasi subsidi dan perlindungan sosial, serta peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pusat dan daerah.

Pokok-pokok arah kebijakan nasional dalam perubahan APBN 2025 :

1. Penguatan Kualitas Belanja :

APBN 2025 menekankan pentingnya efisiensi belanja non-prioritas, penguatan belanja modal untuk transformasi ekonomi, reformasi subsidi dan perlindungan sosial, serta peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pusat dan daerah.

2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan.

3. Fleksibilitas APBN :

APBN 2025 dirancang agar memiliki fleksibilitas, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan memberikan ruang bagi pemerintahan selanjutnya dalam melaksanakan program pembangunan.

4. Pembiayaan APBN :

Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar 2,53% dari PDB, yang akan ditutupi melalui pembiayaan utang yang dikelola secara prudent dan sustainable, serta pembiayaan investasi yang selektif.

5. Prioritas Belanja :

Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam APBN 2025, dengan program-program seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

6. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

Melalui berbagai program prioritas, APBN 2025 diharapkan dapat meningkatkan IPM, khususnya melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dan perbaikan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

7. Pengelolaan Pendapatan Negara :

Pendapatan negara direncanakan bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNBPN. Reformasi perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci dalam mencapai target pendapatan tersebut.

8. Koordinasi dan Sinergi :

APBN 2025 menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dengan demikian, perubahan APBN 2025 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengakselerasi pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025, dimana tujuan pembangunan jangka panjang daerah adalah :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
- b. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas
- c. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maju
- d. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Tujuan

Berdasarkan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan pencapaian tujuan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih
- 2) Meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

b. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Indikatornya adalah sebagai berikut :

- a) Nilai AKIP Perangkat Daerah
- b) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 2) Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD

Indikatornya adalah sebagai berikut :

- a) Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
- 3) Terwujudnya harmonisasi hubungan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan pemerintah daerah.

Indikatornya adalah sebagai berikut :

- a) Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
- b) Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda

Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target jangka menengah Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public	Nilai AKIP Perangkat Daerah	poin	65.27	70.27	75,27
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	78	80	82
2	Meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	persentase	90	90	95
		Terwujudnya harmonisasi hubungan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	persentase	90	90	95
			Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	persentase	70	70	70

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang direncanakan pada tahun 2025 disusun berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu :

- RPD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024-2026
- Efektifitas dan efisiensi anggaran
- Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan sebagai panduan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
- Tuntutan masyarakat akan peningkatan peran dan fungsi lembaga DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah menjadi lembaga yang profesional, produktif dan berwawasan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Perubahan Rumusan dan Program Kegiatan yang terdiri dari 2 program, 16 kegiatan, dan 49 sub kegiatan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD								39.577.334.820	42.553.875.510	37.361.842.985	-2.215.491.835						34.128.575.200	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							39.577.334.820	42.553.875.510	37.361.842.985	-2.215.491.835							34.128.575.200	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							39.577.334.820	42.553.875.510	37.361.842.985	-2.215.491.835							34.128.575.200	
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi				100 %	90 persen	27.062.983.820	26.670.162.410	24.867.932.285	-14.308.310.820							12.754.673.000	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang terselesaikan Jumlah Dokumen DPA yang terselesaikan Jumlah dokumen RKA yang terselesaikan Jumlah laporan LAKIP yang terselesaikan Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah				1 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	1 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	27.239.400	27.239.400	13.603.000	-13.636.400			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kab. Padang Laws Utara		52.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.540.000	4.540.000	4.540.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000	SEKRETARIAT DPRD

															an.						
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.540.000	4.540.000	4.523.000	-17.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				10.000.000,0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.540.000	4.540.000	0	-4.540.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	9.079.400	9.079.400	0	-9.079.400	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			12.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-	12 Laporan	19.863.327.320	19.841.509.510	19.071.265.335	-792.061.985			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		70.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	19.846.041.320	19.824.223.510	19.053.979.335	-792.061.985	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.910.000	5.910.000	5.910.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			8.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.688.000	5.688.000	5.688.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.688.000	5.688.000	5.688.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			12.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah keikutsertaan Pegawai sekretariat DPRD dalam seminar, lokakarya dan studi banding Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya</i>				25 ASN 60 stell	25 ASN 60 stell	210.371.300	249.268.100	220.000.000	9.628.700			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		331.700.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				60 Paket	60 Paket	70.371.300	84.268.100	0	-70.371.300	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			133.700.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	140.000.000	165.000.000	220.000.000	80.000.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			198.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan yang tersediaJumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan yang tersedia Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersediaJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersediaJumlah peralatan rumah tangga yang tersediaJumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersedia				-	1 Paket2 Paket48 Paket	557.543.100	569.571.900	1.457.252.500	899.709.400			Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		2.765.767.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.162.400	31.162.400	79.934.000	48.771.600	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			47.850.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.408.115.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	140.500.200	140.500.200	212.739.000	72.238.800	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			295.814.500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	193.735.000	193.735.000	966.964.200	773.229.200	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			518.680.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	133.109.500	134.338.300	137.355.300	4.245.800	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			275.307.500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				30 Dokumen	30 Dokumen	49.460.000	60.260.000	60.260.000	10.800.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	9.576.000	9.576.000	0	-9.576.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan Jumlah pengadaan meubel</i>				1 unit 20 unit 30 buah	1 unit 20 unit 30 buah	3.072.978.000	1.970.978.200	350.791.200	-2.722.186.800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		2.190.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	2.848.503.000	1.118.115.000	0	-2.848.503.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	27.675.000	302.625.000	0	-27.675.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			30.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	196.800.000	550.238.200	350.791.200	153.991.200	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			160.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa tenaga pendukung administrasi teknik perkantoran Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah materai yang disediakan jumlah tagihan telepon, hndwit internet dan kwh listrik				12 laporan 4000 buah	12 laporan 4000 buah	2.366.804.700	2.852.625.300	2.918.244.250	551.439.550			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		3.778.960.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	60.000.000	40.000.000	30.000.000	-30.000.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			80.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	235.880.000	235.880.000	281.780.000	45.900.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			594.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	200.485.300	200.485.300	235.647.000	35.161.700	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			435.760.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.870.439.400	2.376.260.000	2.370.817.250	500.377.850	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2.669.200.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainnya yang terpelihara</i>				-	2 Unit 4 Unit	223.620.000	280.870.000	104.450.000	-119.170.000			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		1.303.320.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	5 Unit	109.120.000	109.120.000	47.200.000	-61.920.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			851.880.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	6 Unit	114.500.000	171.750.000	57.250.000	-57.250.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			451.440.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Jumlah Medical Check Up DPRD yang terlaksana</i>				-	1 kali	375.000.000	375.000.000	375.000.000	0			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		1.330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				30 Paket	30 Paket	210.000.000	210.000.000	210.000.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				30 Orang	30 Orang	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			330.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Jumlah Fasilitas Fraksi DPRD Jumlah fasilitas makan minum rapat konsultasi dan kordinasi DPRD</i>				12 laporan 20 laporan	12 laporan 20 laporan	366.100.000	503.100.000	357.326.000	-8.774.000			Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		932.926.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD</i>				20 Laporan	20 Laporan	130.360.000	130.360.000	102.960.000	-27.400.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				12 Laporan	12 Laporan	235.740.000	372.740.000	254.366.000	18.626.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			872.926.000	SEKRETARIAT DPRD

2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100 Persen	100 85 90 Persen persen persen	12.514.351 .000	15.883.713 .100	12.493.910 .700	8.859.551.200							21.373.902 .200	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda yang dibahas Persentase Fasilitasi Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang terlaksana				20 dokumen	20 dokumen 90 persen	456.315.00 0	806.315.00 0	633.459.20 0	177.144.200			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		1.753.300. 000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				20Dokumen	20Dokumen	122.895.00 0	122.895.00 0	0	-122.895.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			153.300.00 0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	188.101.00 0	188.101.00 0	26.948.500	-161.152.500	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			400.000.00 0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		

			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				2 Dokume n	2 Dokume n	106.439.00 0	106.439.00 0	217.630.70 0	111.191.700	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.00 0	SEKRETA RIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				20 Dokume n	20 Dokume n	16.960.000	366.960.00 0	366.960.00 0	350.000.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.000.000. 000	SEKRETA RIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			<i>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun</i>				1 Dokume n	1 Dokume n	21.920.000	21.920.000	21.920.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			100.000.00 0	SEKRETA RIAT DPRD

	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah rapat rapat LKPJ kepala daerah tahun anggaran sebelumnya Jumlah terlaksananya kegiatan rapat pembahasan APBDJumlah terlaksananya kegiatan rapat Pembahasan KUA dan PPAS R APBDtahun berikutnya Jumlah terlaksananya kegiatan rapat pembahasan P APBDJumlah terlaksananya kegiatan rapat Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS				1 kali	1 kali	360.391.000	360.391.000	202.663.400	-157.727.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		740.300.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	67.180.000	67.180.000	40.660.000	-26.520.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			124.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	70.495.000	70.495.000	40.660.000	-29.835.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			124.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	90.216.000	90.216.000	40.660.000	-49.556.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			204.800.000	SEKRETARIAT DPRD

													a		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Birokrasi					
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.250.000	74.250.000	40.660.000	-33.590.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				148.300.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	58.250.000	58.250.000	40.023.400	-18.226.600	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				139.200.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur				12 laporan	1 laporan	95.400.000	95.400.000	1.882.320.000	1.786.920.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara			481.600.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	0	0	1786920000	1786920000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				225.800.000	SEKRETARIAT DPRD

															san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.					
	4.02.02.2.03. 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				12 Laporan	12 Laporan	95.400.000	95.400.000	95.400.000	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	Pelaksan aan Reforma si Birokrasi Pelaksan aan Reforma si Birokrasi			255.800.00 0	SEKRETA RIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Jumlah Laporan Orientasi DPRD Jumlah Laporan Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Laporan Penyelenggaraan hubungan masyarakat Jumlah Laporan Penyusunan Program kerja DPRD Jumlah Laporan Publikasi dan Dokumentasi DPRD Persentasi peningkatan kapasitas DPRD</i>				-	1 Laporan 90 persen	888.708.00 0	1.043.348. 000	1.185.513. 000	296.805.000			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	Pelaksan aan Reforma si Birokrasi Pelaksan aan Reforma si Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara		3.529.257. 500	SEKRETA RIAT DPRD
	4.02.02.2.04. 0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				90 Dokume n	90 Dokume n	660.180.00 0	774.420.00 0	984.420.00 0	324.240.000	-	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	Pelaksan aan Reforma si Birokrasi Pelaksan aan Reforma si Birokrasi			1.800.000. 000	SEKRETA RIAT DPRD
	4.02.02.2.04. 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	42.835.000	42.835.000	0	-42.835.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			258.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	142.208.000	142.608.000	142.608.000	400.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.076.257.500	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	43.485.000	83.485.000	58.485.000	15.000.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			395.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Jumlah dokumen kegiatan Reses Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>				2 dokumen 3 dokumen	2 dokumen 3 dokumen	1.794.252.000	1.932.894.100	2.762.970.100	968.718.100			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		3.948.244.700	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		

			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	138642100	138642100	138642100	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.794.252.000	1.794.252.000	2.624.328.000	830.076.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.348.244.700	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah kasus yang diselesaikan				5 laporan	2 laporan	115.785.000	115.785.000	0	-115.785.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		221.200.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	115.785.000	115.785.000	0	-115.785.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			221.200.000	SEKRETARIAT DPRD

	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Jumlah laporan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD</i>				72 laporan	72 laporan	8.803.500.000	11.529.580.000	5.826.985.000	-2.976.515.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara		10.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		SEKRETARIAT DPRD
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	8.623.795.000	11.349.875.000	5.788.625.000	-2.835.170.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	179.705.000	179.705.000	38.360.000	-141.345.000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								39.577.334.820	42.553.875.510	37.361.842.985	177.088.576.008							34.128.575.200	

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang didalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang layanan pengadaan.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

4.2 Kaidah-Kaidah Dalam Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerindah Daerah, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 sebagai berikut :

- 4.2.1 Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 memerlukan waktu yang sangat panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerindah Daerah
- 4.2.2 Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 masih jauh dari sempurna, terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pemahaman tentang tata cara penyusunan masih berbeda-beda

- 4.2.3 Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Renstra OPD).

4.3 Rencana Tindak Lanjut

- 4.3.1 Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan OPD untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks seperti pelatihan, bimtek, sosialisasi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja aparatur perencanaan
- 4.3.2 Aparatur perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada saat ini dari sisi kuantitas sangat kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga dianggap perlu untuk menambah pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai menjadi berimbang
- 4.3.3 Menerapkan system Reward and Punishment terhadap seluruh staf aparatur dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua

pada tanggal : 28 Juli 2025

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
SEKRETARIS,**



**Drs. AR. MARJONI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720608 199302 1 002**